

PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN

LAPORAN KINERJA

T.A. 2024



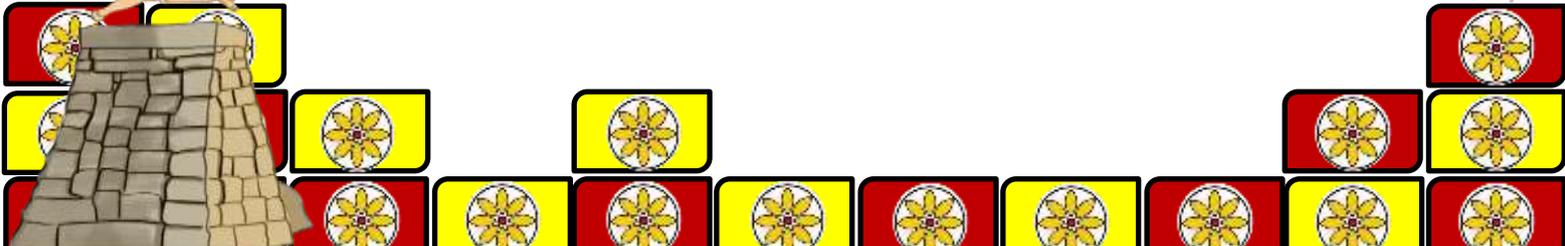
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi melalui masing-masing Perangkat Daerah serta bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan.



Tahun Anggaran 2024 merupakan Tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Secara umum, capaian kinerja dan realisasi anggaran telah memenuhi rencana target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kinerja yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya. Dalam pencapaian kinerja yang maksimal maka sangat dibutuhkan komitmen, kerjasama, koordinasi, dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak antara lain Aparatur Sipil Negara, masyarakat Nias Selatan, dunia usaha dan organisasi nirlaba.

Akhirnya diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Instansi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat bermanfaat dalam optimalisasi peran kelembagan dan peningkatan efektivitas,



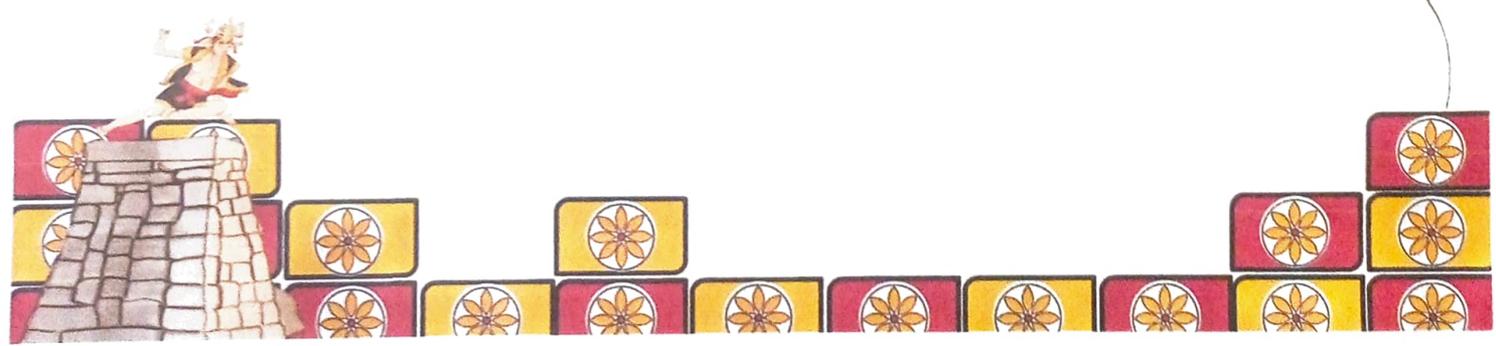
efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

BUPATI NIAS SELATAN,



DR. HILARIUS DUHA, SH., MH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemda Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai target yang ditetapkan. Rincian realisasi masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian	
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91,42	101,5%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	100%
		Nilai SAKIP	56	54,15	96,69%
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas					
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	40%	36,85%	92,12%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,120	0,108	90%
Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif					

3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	58	57,48	99,10%
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	67	77,96	116%
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62	63,78	102,87%

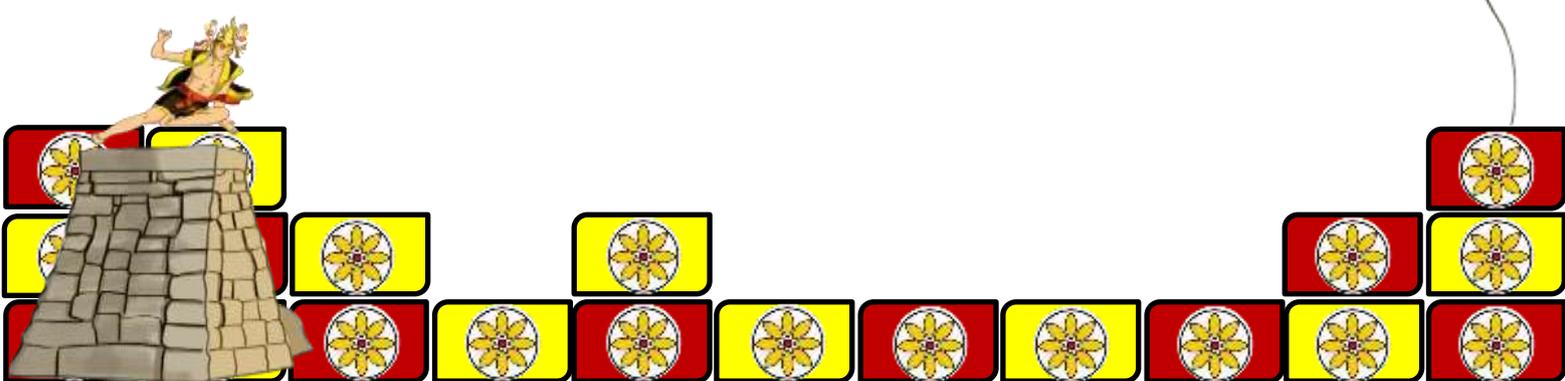
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif

6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,7	3,82	103,24%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	2,8	2,98	106,42%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	5,7	4,62	81,05%

Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Indeks Resiko Bencana (IRB)	189	202	93,56%
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas, persentase capaian kinerja tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja dengan rata-rata capaian sebesar **98,65%** atau hampir mencapai kinerja 100%.



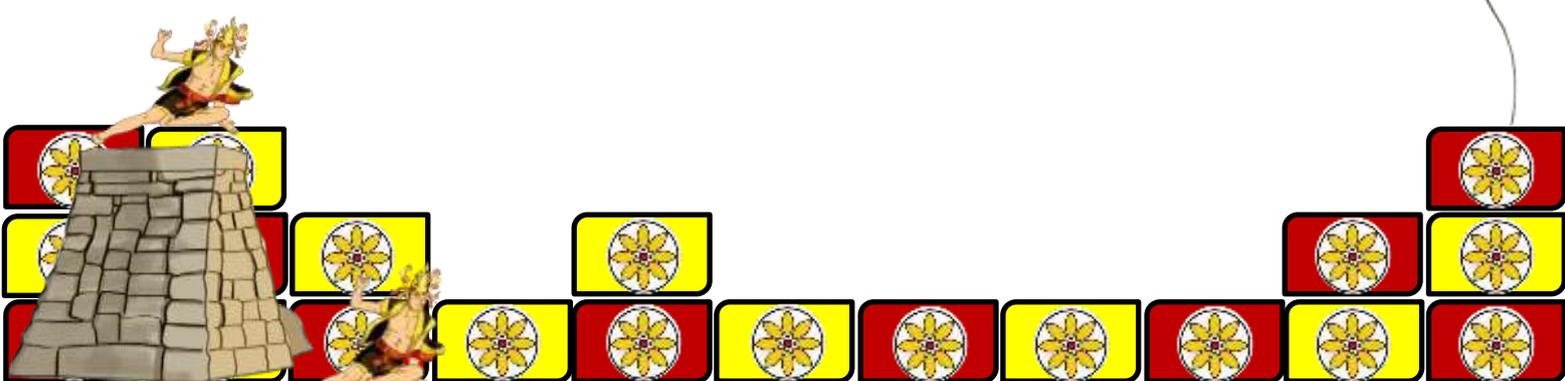
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan	2
C. Kondisi Umum Kabupaten Nias Selatan	4
D. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2023.....	7
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	9
B. Perjanjian Kinerja.....	12
C. Perencanaan Anggaran.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Pengukuran Kinerja	32
B. Analisis Capaian Kinerja.....	34
C. Akuntabilitas Keuangan	91
BAB IV PENUTUP.....	95





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut merupakan bentuk akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja dapat dijadikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

I. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan berdiri pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian oleh Drs. Nabari Ginting, Msi.

II. Kondisi Geografis

Kabupaten Nias Selatan secara astronomis terletak pada $0^{\circ} 33' 25''$ LS – $1^{\circ} 4' 5''$: U dan $97^{\circ} 25' 59''$ – $98^{\circ} 48' 29''$ BT. Letak geografis Kabupaten Nias Selatan di sebelah Barat pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Kota Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Dari gugusan pulau tersebut terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Telo (18 km²) dan Pulau Pini (24,36 km²).

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Nias memiliki luas wilayah administrasi 6.902.505 Km² yang terdiri dari 104 (seratus empat buah pulau, 18 (delapan belas) kecamatan yang kemudian pada tahun 2012 jumlah kecamatan berkembang menjadi 35 kecamatan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 459 Desa. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 adalah 2.487,98 Km². Sedangkan batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terbagi atas 35 Kecamatan, 459 Desa dan 2 Kelurahan.

Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan



III. Kondisi Geografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mencapai 360.531 jiwa. Tingkat Kepadatan penduduk rata-rata 160,16 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km².

C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Nias Selatan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah (Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.10_45 Tahun 2019), terdiri dari:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 4) Bagian Kerjasama;
 - 5) Bagian Perekonomian;

- 
- 6) Bagian Sumber Daya Alam;
 - 7) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 9) Bagian Umum;
 - 10) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - 11) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 12) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Sekretariat DPRD

c. Inspektorat

d. Badan Daerah, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Badan Kepegawaian Daerah;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

e. Dinas Daerah, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UKM;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13) Dinas Perhubungan;

- 
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan P2TSP;
 - 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
 - 17) Dinas Perpustakaan;
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 19) Dinas Pertanian; dan
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

f. Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Teluk Dalam;
- 2) Kecamatan Fanayama;
- 3) Kecamatan Maniamolo;
- 4) Kecamatan Aramo;
- 5) Kecamatan Amandaraya;
- 6) Kecamatan Lolowau;
- 7) Kecamatan Hilimegai;
- 8) Kecamatan Lolomatua;
- 9) Kecamatan Mazino;
- 10) Kecamatan Toma;
- 11) Kecamatan Lahusa;
- 12) Kecamatan Umbunasi;
- 13) Kecamatan Susua;
- 14) Kecamatan Mazo;
- 15) Kecamatan Pulau-pulau Batu;
- 16) Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
- 17) Kecamatan Hibala;
- 18) Kecamatan Ulunoyo;
- 19) Kecamatan Huruna;
- 20) Kecamatan O'ou;
- 21) Kecamatan Onohazumba;

- 
- 22) Kecamatan Hilisalawa'ahe;
 - 23) Kecamatan Ulususua;
 - 24) Kecamatan Sidua'ori;
 - 25) Kecamatan Somambawa;
 - 26) Kecamatan Boronadu;
 - 27) Kecamatan Simuk;
 - 28) Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
 - 29) Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;
 - 30) Kecamatan Tanah Masa;
 - 31) Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
 - 32) Kecamatan Onolalu;
 - 33) Kecamatan Gomo;
 - 34) Kecamatan Idanotae; dan
 - 35) Kecamatan Uluidanotae.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dapat menjadi sarana bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan Masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum diantaranya latar belakang, gambaran umum Kabupaten Nias Selatan, kondisi umum Kabupaten Nias Selatan, permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja tahun, Perjanjian Kinerja Perubahan, Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Perubahan Anggaran .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian indikator sasaran dan realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NIAS SELATAN 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 melanjutkan pembangunan yang belum selesai pada periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021, maka ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

VISI :

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- ❖ **“Nias Selatan Maju”** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- ❖ **“Masyarakat Sejahtera”** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun Misi sebagai berikut :

MISI :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan penajaman terhadap Visi “**Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**” dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan :

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

b. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan



dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.

d. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

e. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhi nya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target	
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP
		Nilai SAKIP	60
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	95%
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	12%
		Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	40%
		Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN	59%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,120
Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif			
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	58
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	67
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62

Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif

6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,7
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	2,8
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	5,7

Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	189
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%
		Persentase Warga Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/81/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 3 September 2024 bahwa pada kriteria Perencanaan Kinerja bahwa masih terdapat Indikator Kinerja Bupati yang belum memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable achievable, relevant, and time-bound*), maka pada Perjanjian Kinerja Perubahan telah dilakukan penyesuaian sebagaimana tertera pada tabel berikut.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan		
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP
	Nilai SAKIP	56
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas		
2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	40%
	Rasio Rumah Layak Huni	0,120
Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif		
3 Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	58
4 Meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	67
5 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif		
6 Meningkatkan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,7
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	2,8
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	5,7
Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat		

7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Indeks Resiko Bencana (IRB)	189
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegaskan	100%

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Rincian APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Anggaran Belanja Tahun 2024

No	Nama Program	Total Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	532.713.067.446
2	Program Pengelolaan Pendidikan	119.522.903.000
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	149.294.720.522
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.753.000.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.052.974.508
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	7.513.746.312
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.218.991.719
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.090.268.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	12.783.849.786
10	Program Penyelenggaraan Jalan	89.781.317.877
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.700.000.000
12	Program Pengembangan Perumahan	15.068.020
13	Program Kawasan Permukiman	341.348.700

15	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	552.184.400
16	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	70.165.000
17	Program Penanggulangan Bencana	105.350.000
18	Program Rehabilitasi Sosial	20.638.000
19	Program Penanganan Bencana	4.950.000
20	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	372.606.300
21	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	255.770.000
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	202.000.000
23	Program Pengembangan UMKM	510.000.000
24	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	145.830.000
25	Program Perlindungan Perempuan	2.578.000
26	program peningkatan kualitas keluarga	7.196.000
27	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2.181.600
28	Program Perlindungan Khusus Anak	9.972.000
29	Program Pengendalian Penduduk	3.629.895.400
30	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.135.690.000
31	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.980.000.400
33	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	859.308.479
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.707.357.177
35	Program Pengelolaan Persampahan	641.772.650
37	Program Administrasi Pemerintahan Desa	111.314.382
38	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.289.126
39	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	139.320.000
40	Program Pengelolaan Pelayaran	2.796.200.000
41	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	216.800.000
42	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.281.738.800

43	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	50.000.000
44	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000
45	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	149.824.600
46	Program Promosi Penanaman Modal	50.051.100
47	Program Pelayanan Penanaman Modal	50.000.000
48	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	532.100.000
49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	374.398.500
51	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	23.708.600
52	Program Pengembangan Kebudayaan	103.000.000
53	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	149.919.000
54	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	670.798.784
55	Program Pemasarana Pariwisata	5.515.172.393
56	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	715.075.716
57	Program Pembinaan Perpustakaan	79.834.800
58	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.423.745.843
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.002.631.364
60	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	46.750.592
61	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.051.529.244
62	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.620.070.475
63	Program Penyuluhan Pertanian	230.000.000
64	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	509.025.800
65	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	68.823.400
66	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	79.900.510
67	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23.084.668.126
68	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.304.867.769

69	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.301.828.000
70	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	396.780.600
71	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	482.430.200
72	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	135.590.032
73	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	495.961.895.517
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	894.443.363
75	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	651.709.500
76	Program Kepegawaian Daerah	1.412.614.313
77	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.872.745.800
78	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	306.629.300
79	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	784.827.703
80	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1.177.582.257
81	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	198.696.579
82	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	304.553.065
83	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	514.657.000
84	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.630.321.500
85	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	162.685.500
86	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.940.856.400
87	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	34.926.000
Total Anggaran		1.638.170.897.561

APBD Tahun 2024 mengalami perubahan atau pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor:10.3.3.2/85/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Selatan

Nomor:100/3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (APBD PERUBAHAN 2024)

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	572.776.847.199
2	Program Pengelolaan Pendidikan	216.867.404.900
3	Program Pengembangan Kurikulum	7.499.895
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.619.985
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.282.223.992
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.469.582.550
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	256.601.000
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.254.757.515
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.027.108.143
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.823.661.000
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.772.000.000
12	Program Penataan Bangunan Gedung	21.155.424.762
13	Program Penyelenggaraan Jalan	102.930.371.987
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.202.868.800
15	Program Pengembangan Perumahan	10.276.170
16	Program Kawasan Permukiman	10.420.570
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.937.020.873
18	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	669.150.587
19	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	68.500.000
20	Program Penanggulangan Bencana	51.850.000
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	719.799.375

22	Program Penanganan Bencana	702.000.039
23	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	610.098.624
24	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	243.125.000
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	555.783.000
26	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	250.000.000
27	Program Pengendalian Penduduk	895.023.400
28	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.742.647.750
29	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.195.620.000
30	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	153.526.994
31	Program Penanganan Kerawanan Pangan	332.197.982
32	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	9.100.000
33	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.027.554.427
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	30.000.000
35	Program Administrasi Pemerintahan Desa	106.980.243
36	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.006.355.732
37	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	479.771.065
38	Program Pengelolaan Pelayaran	4.831.609.000
39	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	449.066.225
40	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	973.112.285
41	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	40.000.000
42	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	30.000.000
43	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.121.300

44	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	330.875.000
45	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.450.000.000
46	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	30.291.400
47	Program Pengembangan Kebudayaan	440.840.270
48	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	329.352.600
49	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	398.932.550
50	Program Pemasaran Pariwisata	5.804.775.140
51	Program Pembinaan Perpustakaan	250.000.000
52	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	345.125.118
53	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	149.112.958
54	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.699.000
55	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.543.820.498
56	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.768.915.765
57	Program Penyuluhan Pertanian	784.943.710
58	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	535.117.155
59	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.056.500
60	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.592.242.853
61	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.130.847.005
62	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.218.866.450
63	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	397.166.155
64	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	493.179.295
65	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	436.606.630

66	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	493.753.532.360
67	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.310.161.213
68	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.963.750
69	Program Kepegawaian Daerah	935.935.800
70	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.424.677.415
71	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	595.219.550
72	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	429.755.314
73	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1.123.713.451
74	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.679.731.862
75	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	207.559.572
76	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.003.100
77	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.737.234.235
78	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	75.605.719.705
79	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.297.500
80	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	542.922.100
81	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	401.587.800
TOTAL ANGGARAN		1.730.280.463.148

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NIAS SELATAN (2021-2026)

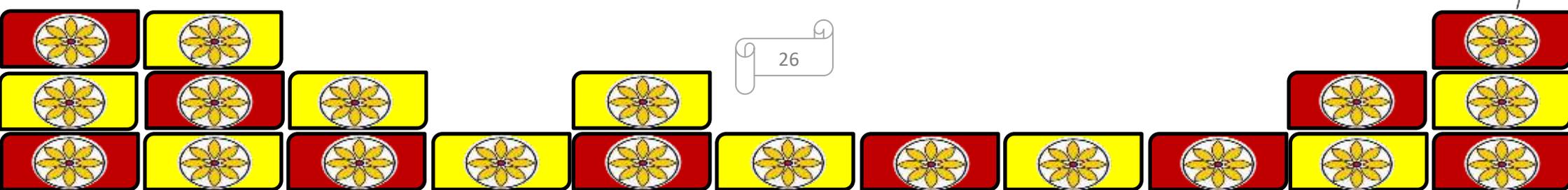
No	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	-	C	C	CC	CC	B	B
		1.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi
				Nilai SAKIP	Predikat	C	C	B	B	B	B	B
				Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan		Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	54.36	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	75.74
		2.1.1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	61	65	68	71	75	75
				Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55.72	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	76.47
				Persentase jaringan irigasi	Rasio	49,55	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	52.04

			dalam kondisi baik								
			Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76.04	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	97.84
			Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0.048	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	0.059
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39
		3.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	53.56	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56
		3.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	72.90	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28
		3.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	-	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13
4	Mengembangkan	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.61	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33

	Perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif	dan inovatif										
		4.1.1	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1.04-2.22	2.22-3.40	3.40-4.00	4.00-4.45	4.45	4.45
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	3.64
5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan		Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
				Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	202	197	197	192	192	192
		5.1.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100

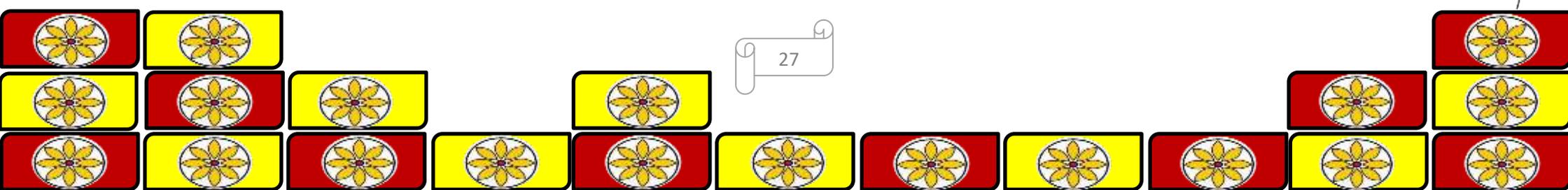


			Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100	100	100	100
--	--	--	---	--------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



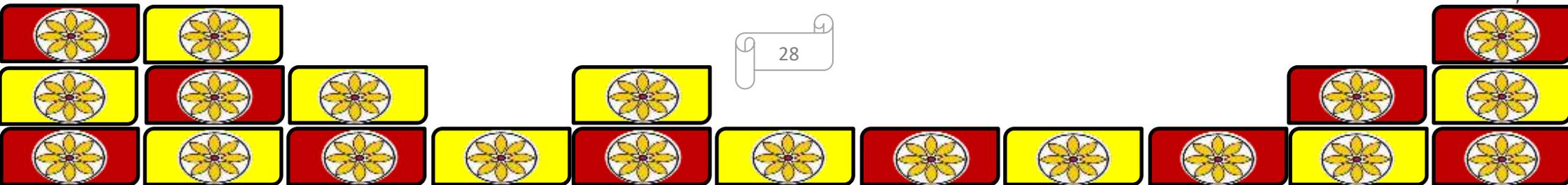
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja					Defenisi Operasional IKU	Perangkat Daerah Penanggung jawab																
					2022	2023	2024	2025	2026																		
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C	CC	CC	B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Komponen Pengungkit</td> <td>60%</td> <td> a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%) </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komponen Hasil</td> <td>40%</td> <td> a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen	1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)	2	Komponen Hasil	40%	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)	Total		100%		Sekretariat Daerah
		No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen																						
1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)																								
2	Komponen Hasil	40%	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)																								
Total		100%																									
	1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Ket: Unsur Pelayanan = prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan,</p>	Sekretariat Daerah																





										keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, kenyamanan pelayanan		
			Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	B		Sekretariat Daerah	
			Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	
2	Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan	Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	<i>Proxy</i> = Rata – rata dari lima indikator sasaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	61	65	68	71	75	$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yang dapat terlayani}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih}}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Rasio	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi yang dibangun}}{\text{Luas Daerah Irigasi Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	$\frac{RT_{PLN}}{RT} \times 100\%$ Ket: RT _{PLN} = Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN RT = Jumlah Rumah Tangga	Sekretariat Daerah
			Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Seluruh Perangkat Daerah
		3.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Dinas Pendidikan
										Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0	

										<p>RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>		
	3.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Ket: AHH = Angka Harapan Hidup AHH_{min} = 25; AHH_{maks} = 85</p>	Dinas Kesehatan	
	3.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	$\frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(Pengeluaran_{maks}) - \ln(Pengeluaran_{min})}$	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
4	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya</p>	Seluruh Perangkat Daerah	
		4.1.1	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1.04-2.22	2.22-3.40	3.40-4.00	4.00-4.45	4.45	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Pertanian</p>	Dinas Pertanian
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan	Persen	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan

		budaya secara optimal	Akomodasi dan makan minum) Pariwisata							Ket: PDRB atas dasar harga konstan T = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP = Kategori Pariwisata	Olahraga
5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
			Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	197	197	192	192	$IRB = \frac{H \times V}{C}$ Ket: IRB = Indeks Resiko Bencana H = Indeks Bahaya (Hazard) V = Indeks Kerentanan (Vulnerability) C = Indeks Kapasitas (Capacity)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5.1.1 Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat
			Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam Yang Berhasil Diselamatkan dan Dievakuasi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Korban Bencana Alam}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terhadap seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun ke-3(tiga) pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan periode 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar **98,65%** yang dihitung dari rata-rata capaian dari 13 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian	
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91,42	101,5%
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	100%
		Nilai SAKIP	56	54,15	96,69%
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas					

2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	40%	36,85%	92,12%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,120	0,108	90%

Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif

3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	58	57,48	99,10%
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	67	77,96	116%
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62	63,78	102,87%

Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif

6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,7	3,82	103,24%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	2,8	2,98	106,42%
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	5,7	4,62	81,05%

Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat

7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Indeks Resiko Bencana (IRB)	189	202	93,56%
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%

Berdasarkan data tabel diatas, persentase capaian kinerja tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja dengan rata-rata capaian sebesar **98,65%** atau hampir mencapai kinerja 100%.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Analisa terhadap 7 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja diuraikan sebagai berikut.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	91,42	101,5%

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai Misi 1 (satu) yakni : “Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan, dan Berorientasi Pada Pelayanan”. Penekanan pada kalimat “Berorientasi Pada Pelayanan” dapat diwujudkan melalui pelayanan yang berkualitas dengan mengutamakan kepentingan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dapat tercermin atau diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Representasi penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui unit pelayanan publik di sektor perizinan, kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pencatatan sipil, dan sosial. Indeks Kepuasan Masyarakat atau disingkat IKM diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat wajib dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan antara lain :

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	Target Akhir RPJMD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,8	91,42	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan apresiasi yang baik dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Hasil Nilai IKM yang diperoleh yakni rata-rata nilai IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjadi sampel antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

2. Dinas Sosial
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan
6. UPT Puskesmas Bawomataluo
7. UPT Puskesmas Hilisataro

➤ **Analisa Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey IKM oleh unit pelayanan publik yang menjadi sampel dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing UPP.
- b. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bagian Organisasi dan UPP dalam mendorong penyelenggaraan survey IKM.
- c. Nilai IKM menjadi salah satu kinerja bagi UPP yang dinilai baik melalui penilaian SAKIP dan juga penilaian kepatuhan pelayanan publik Ombudsman, sehingga UPP termotivasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik dan menjadikan survei IKM sebagai salah satu kinerja rutin tiap tahun.

2. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP*	100%

Catatan: *Capaian masih menggunakan Opini BPK Tahun 2023.



Berdasarkan data pada tabel diatas, untuk sementara capaian kinerja tahun 2024 masih menggunakan opini BPK tahun 2023 yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Hal ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara Nomor:164.B/S/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Capaian kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan BPK antara lain :

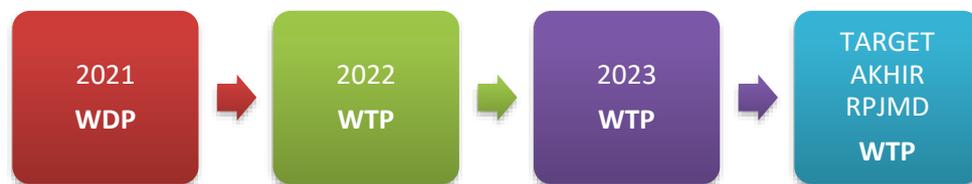
- a. Pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundanga-undangan masih terdapat temuan yaitu :
 - Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada sembilan OPD tidak sesuai ketentuan;
 - Penyajian hutang jangka pendek lainnya atas SP2D Outstanding Tahun 2014 dan 2015 belum mencerminkan keadaan sebenarnya.
- b. Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan untuk memerintahkan :
 - Tim Penyusun merevisi standar satuan biaya perjalanan dinas agar menyesuaikan dengan peraturan diatasnya;
 - Kepala OPD agar lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas pada satuan kerja yang dipimpinnya; menginstruksikan PPK lebih cermat memverifikasi kelengkapan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran belanja perjalanan dinas; dan memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp518.076.200
 - Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Teknis yang bertugas memvalidasi dokumen pertanggungjawaban hutang SP2D

Outstanding Tahun 2014 dan Tahun 2015. Selanjutnya memproses hutang yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi BPK diatas maka pada tahun 2024 telah dilaksanakan tindaklanjut atas temuan dan rekomendasi antara lain :

- Telah dilakukan penyesuaian standar satuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan diatasnya;
- Kepala OPD melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan pada satuan kerjanya masing-masing
- Telah dibentuk Tim Teknis yang melakukan validasi terhadap dokumen pertanggungjawaban hutang SP2D Outstanding Tahun 2014 dan Tahun 2015

Perbandingan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dari tahun ke tahun dan target RPJMD



➤ Analisis Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyajian laporan keuangan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang semakin berkualitas baik dari tahun ke tahun.
2. Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh terhadap tindaklanjut atas temuan dan rekomendasi BPK.

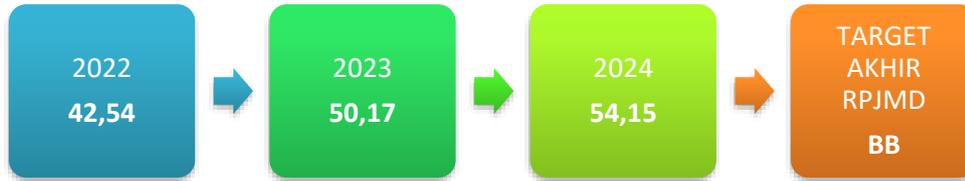
3. Sinergitas yang baik antara BPKPD dengan semua PD dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Nilai SAKIP

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	56	54,15	96,69%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan Tahun 2024 telah ditargetkan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar 56 dengan predikat CC. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP yaitu 54,15 dengan tingkat persentase capaian 96,69% atau hampir 100%. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/81/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Capaian Kinerja ini masih belum 100% memenuhi target yang ditetapkan dan masih terdapat beberapa temuan dan rekomendasi Kementerian PANRB terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah kabupaten Nias baik di level Pemerintah Daerah maupun di level Perangkat Daerah dan Kecamatan. Temuan dan rekomendasi Kemenparb ditindaklanjuti melalui matriks tindaklanjut atas rekomendasi LHE tahun 2024 yang akan diupload dalam aplikasi ESR Kementerian PANRB.

Perbandingan Nilai SAKIP dari Tahun ke Tahun



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP Pemda bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan, walaupun masih belum memenuhi target akhir RPJMD yakni dengan predikat BB.

➤ Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan :

- Keberhasilan capaian kinerja Nilai SAKIP didukung oleh komitmen Pimpinan Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Kegagalan capaian kinerja dipicu oleh beberapa hal yaitu masih terdapat Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan kinerjanya belum sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan, pengukuran kinerja yang belum maksimal dan evaluasi internal juga yang masih belum optimal dan berkualitas baik.
- Terhadap keberhasilan diatas maka diupayakan untuk terus ditingkatkan baik di level Pemda maupun PD dan pada kegagalan-kegagalan yang terjadi selama ini akan segera diperbaiki sehingga pada penilaian tahun berikutnya kegagalan implementasi SAKIP dapat teratasi dengan baik.

4. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	40%	36,85%	92,12%

Tingkat kondisi dimaksud adalah kondisi jalan minimal pada kondisi sedang, tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten (Kondisi baik dan sedang) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan}} \times 100\%$$

Tingkat kemantapan jalan kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 40% dan capaian kinerja yaitu 36,85%. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari rincian meliputi panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang yaitu 315.992 Km, sedangkan panjang seluruh jalan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 adalah 857.411 Km sehingga diperoleh persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten Nias Selatan tahun 2024 yaitu 36,85%. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{315.992 \text{ Km}}{857.411 \text{ Km}} \times 100\% = 36,85\%$$

Perbandingan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Nias Selatan

Target	Capaian 2024	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD
40%	36,85%	35,33%	84,09%

Berdasarkan tabel diatas, capaian tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 bila dibandingkan dengan target masih belum cukup memenuhi target. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya maka sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,52%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian pada tahun 2024 masih belum memenuhi target yang diharapkan pada tahun terakhir RPJMD.

➤ **Analisa Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Perencanaan pembangunan jalan yang telah termuat dalam perencanaan kabupaten RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Selatan
- Pengalokasian anggaran dengan skala prioritas untuk mencapai tingkat kemantapan jalan sebagaimana yang telah ditargetkan.
- Adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara semua stakeholder baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan jalan kabupaten.

Sedangkan, faktor kegagalan capaian yang terealisasi terhadap target yang ditetapkan antara lain:

- Alokasi anggaran pembangunan jalan tahun 2024 yang kurang memenuhi target yang ditetapkan karena adanya pergeseran anggaran.

Dokumentasi Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2024



Rincian Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2024

No	Uraian Kegiatan	Lokasi		Volume	Satuan
		Desa	Kecamatan		
1	Pembangunan drainase di ruas Jalan Naniyo	Sondregeasi	Luahagundre	1064	M
2	Pembangunan tembok penahan tanah dan perkerasan badan jalan di Naniyo Kab. Nias Selatan	Sondregeasi	Luahagundre	311,89	M
3	Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju Gedung Kesenian di Pantai Sorake	Botohili Sorake	Luahagundre	73,5	M
4	Lanjutan pembangunan jalan non Status dari Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo menuju Lewa- Lewa Kecamatan Boronadu	Sambulu	Ulunoyo	534	M
5	Lanjutan Pembangunan Jalan non status di	Hiliganowo	Teluk Dalam	46	M

	Balikhi Desa Hiliganowo				
6	Lanjutan Pembangunan Jalan non status menuju RSUD di Desa Hilianaa	Hiliana'a	Teluk Dalam	124	M
7	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi dari Dusun 4 menuju Dusun 5 Alo'oa Desa Hiliaurifa Kecamatan Maniamolo	Hiliaurifa	Maniamolo	110	M
8	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi di Dusun I (satu) Desa Hilimboe Kecamatan Susua	Hiilimboe	Susua	56	M
9	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi ruas Jl. Sifitu Ewali (dari Desa Sebuasi menuju Desa Sidua Ewali) Kecamatan Pulau Pulau Batu	Sebuasi	PP. Batu	128	M
10	Lanjutan pembangunan Jl. Naniyo Kecamatan Luahagundre	Sondregeasi	Luahagundre	1064	M
11	Lanjutan pengerasan jalan non status Hao sauso Desa Lawindra Kecamatan Umbunasi	Lawindra	Umbunasi	232	M
12	Lanjutan Peningkatan jalan non status dari Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama menuju Desa Hilimondregeraya Kecamatan Onolalu	Siwalawa	Fanayama	80	M
13	Lanjutan semenisasi jalan non status dari Desa Hilisao'oto menuju Desa Orahuahili Kecamatan Mazo	Hilisao'oto	Mazo	74,41	M
14	Lanjutan semenisasi jalan non status dari Desa Hoya menuju Desa Luahandroito Kec. Mazo	Hoya	Mazo	128,5	M

15	Lanjutan semenisasi jalan non status dari jl. Bawomataluo menuju Namo Sifelendrua Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	500	M
16	Lanjutan semenisasi jalan non status dari simpang Lazawatewu Desa Hilidanayao menuju Desa Hilimboho Kecamatan Susua	Hilidanayao	Susua	58,94	M
17	Lanjutan semenisasi jalan non status di Desa Gabungan Tasua Kecamatan Somambawa	Gabungan Tasua	Somambawa	141,22	M
18	Lanjutan semenisasi Jl. Hilizalootano dari Idanowawa menuju Kantor Camat Kecamatan Mazino	Hilizalo'otano	Mazino	378,5	M
19	Pembangunan Jalan non status di Desa Borowosi menuju Kecamatan Ulunoyo	Borowosi	Ulunoyo	181	M
20	Pembangunan Jalan dari jalan Nasional menuju Puskesmas Hilisataro Kecamatan Toma	Hilisataro	Toma	217,98	M
21	Pembangunan jalan dari Pintu Gerbang Botohili Salo'o menuju Jalan Fahasaradodo Desa Botohili Salo'o Kec. Luahagundre	Botohili Salo'o	Luahagundre	122,5	M
22	Pembangunan jalan dari ruas jalan Lolomatua jembatan Ulunoyo menuju ruas jalan Sambulu Desa Orahili Kecamatan Ulunoyo	Orahili	Ulunoyo	85	M
23	Pembangunan jalan di Walo Green menuju BBI Kecamatan Teluk Dalam	Nanowa	Teluk Dalam	150	M

24	Pembangunan jalan menuju Hiliafuriata Kel. Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	72	M
25	Pembangunan Jalan non status dari Jalan Nasional menuju Fazui Laza Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	63,5	M
26	Pembangunan jalan non status (dari Tetelesi Desa Tanonikoo menuju Dao-Dao Januwo) Kecamatan Ulu Idanotae	Tanoniko'o	Idanotae	490,8	M
27	Pembangunan jalan non status di Desa Hiliwatema Kecamatan Lahusa	Hiliwatema	Lahusa	126,7	M
28	Pembangunan Jalan non Status di Jalan Fanayama Baloho Kecamatan Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	46,5	M
29	Pembangunan Jalan Non Status di Kompleks Perumahan Yofe	Hiliana'a	Teluk Dalam	384,8	M
30	Pembangunan jalan non status di Lawayo Desa Bawozaua Kecamatan Teluk Dalam	Bawozaua	Teluk Dalam	204	M
31	Pembangunan Jalan non status (menuju Gereja Kristen Kemah Daud Tamariskha) Kecamatan Telukdalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	40	M
32	Pembangunan jalan semenisasi dari jalan Pramuka menuju Gereja GKB Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	65,66	M
33	Pembukaan badan jalan Bukit Balikhi di Desa Hiliganowo	Hiliganowo	Teluk Dalam		M
34	Peningkatan jalan Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam	Bawodobara	Teluk Dalam	720	M
35	Peningkatan jalan	Bawomaenamolo	Luahagundre	223	M

	Bawomaenamolo-Sotoo Kecamatan Luahagundre				
36	Peningkatan jalan non status di Walo Kecamatan Telukdalam	Nanowa	Teluk Dalam	376	M
37	Peningkatan Jl. Hilisataro dari Hilisataro Gewa menuju SMA Negeri 1 Toma	Hilisataro	Toma	675,51	M
38	Peningkatan Jl. Maluo dari Desa Hiliadulo menuju Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliadulo	Hilisalawa'ahe	288	M
39	Peningkatan ruas jalan Aramo di Kecamatan Aramo	Aramo	Aramo	1500	M
40	Rehabilitasi Jl. Togizita Kec. Hilimegai	Togizita	Hilimegai	110	M
41	Rehabilitasi Jl. Bawolowalani dari Jalan Nasional (samping Gereja BNKP Yohanes) menuju Banua Satua Bawolowalani	Bawolowalani	Teluk Dalam	200	M
42	Rehabilitasi Jl. Bawomataluo Kecamatan Fanayama	Bawomataluo	Fanayama	133	M
43	Rehabilitasi Jl. Boronadu	Boronadu	Boronadu	1249	M
44	Rehabilitasi Jl. Lawelu (dari pekan Orahili menuju pekan Hiliweto) Kec. Onohazumba	Orahili	Onohazumba	1082	M
45	Rehabilitasi jl. Lolomatua (di Desa Lawa-lawa Luo Dusun Silewe) Kec. Lolomatua	Lawa-lawa Luo	Lolomatua	50	M
46	Rehabilitasi Jl. Soi (dari Arah Kantor Camat Ulususua menuju Pasar Pekan Godu)	Godu	Ulususua	763	M
47	Rehabilitasi Jl. Soi dari Desa Hilimboe Kecamatan Susua	Hilimboe	Ulususua	272	M

	menuju Kecamatan Ulu Susua				
48	Rehabilitasi Jl. TPA Hilitobara di Desa Hilitobara Kecamatan Telukdalam	Hilitobara	Teluk Dalam	279	M
49	Semenisasi Jalan di Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama	Hilinawalo Fau	Fanayama	134	M
50	Semenisasi jalan non status dari Desa Ulumazo menuju Desa Hilimaufa Kecamatan Mazo	Hilimaufa	Mazo	146	M
51	Semenisasi Jalan non status dari Dusun 4 menuju Dusun 5 Desa Tuhemberua Kecamatan Lolomatua	Tuhemberua	Lolomatua	110	M
52	Semenisasi Jalan non status dari jalan Nasional menuju Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	175	M
53	Semenisasi Jalan non status dari Pasar menuju Desa Silina Kecamatan Simuk	Silina	Simuk	365,58	M
54	Semenisasi Jalan non status dari Puskesmas Susua Lama menuju puskesmas Susua Baru Desa Sifalago Susua Kecamatan Susua	Sifalago Susua	Susua	109,24	M
55	Semenisasi Jalan non status Desa Zia Biang Dusun I Banua Hilizamogoboro Kecamatan Pulau Pulau Batu Utara	Zia Biang	PP. Batu Utara	201,85	M
56	Semenisasi jalan non status di Baloho di belakang BPN	Teluk Dalam	Teluk Dalam	130,37	M
57	Semenisasi jalan non	Bawogosal	Maniamolo	159	M

	status di Desa Bawogosal				
58	Semenisasi Jalan non status di Desa Bawolahusa Doli-Doli Kecamatan Mazino	Bawolahusa Doli-Doli	Mazino	80	M
59	Semenisasi jalan non status di Desa Orahili Faomasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo	Orahili Faomasi	Maniamolo	173	M
60	Semenisasi jalan non status menuju SD Hoya Ambukha Kecamatan Somambawa	Ambukha	Somambawa	38,57	M
61	Semenisasi jalan non status/TPT menuju pantai Mogae Kec. Lahusa	Mogae	Lahusa	156,3	M
62	Semenisasi Jl. Eho Tebolo dari Desa Bawootanio Omega menuju Desa Lumbui Kecamatan Hibala	Bawootanio Omega	Hibala	290	M
63	Swakelola pematangan lahan di Lokasi Kantor Pemerintahan di Lawayo Desa Bawozaua Kec. Teluk Dalam	Bawozaua	Teluk Dalam		M
64	Lanjutan pembangunan jalan lingkar Desa Ehosakhozi Kec. Huruna	Ehosakhozi	Huruna	93	M
65	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi dari jalan pramuka menuju Gereja GKB Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	65,66	M
66	Lanjutan peningkatan Jalan Maluo dari Desa Hiliadulo menuju Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahe	Hiliadulo	Hilisalawa'ahe	178	M
67	Lanjutan rehabilitasi jalan Yofe	Hiliana'a	Teluk Dalam	91	M
68	Lanjutan semenisasi jalan non status di Desa	Bawogosal	Maniamolo	62	M

	Bawogosali Kec. Maniamolo				
69	Lanjutan semenisasi jalan non status di Jalan Fanayama Kec. Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	124	M
70	Pembangunan jalan dari Daerah Gumbu menuju Pantai Ikhuhele Desa Hilitobara Kec. Teluk Dalam	Hilitobara	Teluk Dalam	82	M
71	Pembangunan jalan dari Jalan Baloho Indah menuju Lapangan Futsal Atila	Teluk Dalam	Teluk Dalam	116,7	M
72	Pembangunan jalan dari Jl. Ehosofayo menuju Daro-Daro Nina Kec. Toma	Ehosofayo	Toma	108	M
73	Pembangunan Jalan di Komplek Lanal Nias	Teluk Dalam	Teluk Dalam	125,8	M
74	Pembangunan jalan non status untuk perluasan kawasan permukiman penduduk di Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	64,5	M
75	Pembangunan jalan Pedestrian menuju Pantai Nanio	Sondregeasi	Luahagundre		M
76	Pembangunan pengerasan jalan di Dusun Satu Desa Tanonikoo Kec. Gomo	Tanoniko'o	Gomo	158	M
77	Pembangunan semenisasi jalan dari Desa Ewo Kec. Lolomatua menuju Desa Suka Maju Dusun 3 Fadorohili Kec. O'ou	Ewo	Lolomatua	137,5	M
78	Pembangunan Semenisasi jalan dari Kantor Camat Pulau-	Labuhan Hiu	PP. Batu Timur	185	M

	Pulau Batu Timur menuju Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur				
79	Pembangunan jalan semenisasi non status dari jalan raya arah lagundri Km 7 menuju Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sukacita Bombono Desa Bawofanayama Kec. Fanayama	Bawofanayama	Fanayama	102,7	M
80	Pembangunan TPT di SMPN 2 Mazo di Desa Luahandroito Kec. Mazo	Luahandroito	Mazo	46	M
81	Pembangunan jalan non status (dari jalan Golkar Ujung Kecamatan Telukdalam menuju Hilionaha Kec. Onolalu)	Teluk Dalam	Teluk Dalam	120,3	M
82	Pengerasan jalan Hiliwaebu Dusun 2 menuju Desa Hilitobara dan Desa Hilimboho Kec. Susua	Hilitobara	Susua	46	M
83	Peningkatan jalan dari Desa Hilimbaruzo menuju Desa Siraha Kec. Boronadu	Hilimbaruzo	Boronadu	65	M
84	Rehabilitasi jalan dari Desa Tanoniko'o menuju Desa Damai	Tanoniko'o	Amandraya	117	M
85	Rehabilitasi jalan Dusun III Desa Hilisimaetano Kec. Maniamolo	Hilisimaetano	Maniamolo	245	M
86	Rehabilitasi jalan non status dari Jl. Pelita menuju Jl. Pramuka	Teluk Dalam	Teluk Dalam	107	M
87	Rehabilitasi jl. Soi mulai dari simpang Desa Foikhu Fondrako menuju Kecamatan Ulususua	Foikhu Fondrako	Ulususua	268	M
88	Semenisasi jalan Dao-	Dao-Dao	Susua	48	M

	Dao Zanuwo Kec. Susua	Zanuwo			
89	Semenisasi jalan dari Desa Marao Kecamatan Ulunoyo menuju Desa Tumari Kecamatan Lolomatua	Marao	Ulunoyo	166	M
90	Semenisasi jalan dari Desa Sifalago Susua menuju Desa Orahili Susua	Sifalago Susua	Susua	91	M
91	Semenisasi jalan dari Jalan Nasional menuju Daro-Daro Sisiwa Desa Bawoganowo Kec. Toma	Bawoganowo	Toma	98,5	M
92	Semenisasi jalan dari Jalan Pendidikan menuju SMK Negeri 1 Amandraya Desa Tuindrao Kec. Amandraya	Tuindrao	Amandraya	117	M
93	Semenisasi jalan dari Perbatasan Desa Hilimaera dengan Desa Hilifakhe menuju Desa Bawololomatua Kec. Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	64	M
94	Semenisasi jalan Desa Hilidanayao menuju SMP Negeri 6 Susua Kec. Susua	Hilidanayao	Susua	27,3	M
95	Semenisasi jalan di Desa Hiliorahua Zoi Kec. Susua	Hiliorahua Zoi	Susua	94	M
96	Semenisasi jalan di Desa Lolosoni Kec. Gomo	Lolosoni	Gomo	61	M
97	Semenisasi jalan non status daru Jalan Sudirman menuju Mushola Al Bayyinah dan Rumah Yatim Duafa Yaa Bunayya Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam	Teluk Dalam	Teluk Dalam	184,5	M

98	Semenisasi jalan non status Desa Hilimaera Kec. Ulunoyo	Hilimaera	Ulunoyo	119,5	M
99	Semenisasi jalan non status di Desa Hilimaenamolo Kec. Luahagundre	Hilimaenamolo	Luahagundre	71,5	M
100	Semenisasi jalan non status di kawasan permukiman Lalagatua Desa Hilianaa Kec. Teluk Dalam	Hilianaa	Teluk Dalam	70,4	M
101	Semenisasi jalan non status di Komplek Jalan menuju Dinas Kesehatan	Teluk Dalam	Teluk Dalam	33	M
102	Semenisasi jalan non status di Olayama menuju Situs Omo Kara Kec. Huruna	Olayama	Huruna	111	M
103	Semenisasi jalan non status di Sifaoroasi menuju SMP 3 Huruna Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	75	M
104	Semenisasi jalan non status dusun 1 RT 3 Desa Sifaoroasi Huruna Kec. Huruna	Sifaoroasi	Huruna	56,5	M
105	Semenisasi jalan non status lintas komunitas susteran menuju Sekolah TK Santo Antonius Amandraya	Amandraya	Amandraya	48	M
106	Semenisasi jalan non status Malimbe atas dari Gereja BNKP Jemaat Sion Nanowa lingkungan 3 Desa Nanowa Kec. Telukdalam menuju simpang Jalan ke Lapas	Nanowa	Teluk Dalam	60,01	M
107	Semenisasi jalan non status menuju Jalan Baru Simpang SD Bawootalua Kec. Lahusa	Bawo'otalua	Lahusa	51,5	M

108	Semenisasi Lorong Sumomaru Lorong Boli Desa Fuge Kec. Pulau-Pulau Batu Barat	Fuge	PP. Batu Barat	175	M
109	Swakelola pembukaan badan jalan di Wilayah Kec. Lolomatua, Kec. Ulunoyo dan Kec. Ulususua melalui Karya Bakti TNI		Lolomatua	4700	M
110	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilimondrege Raya	Hilimondrege Raya	Onolalu	5300	M
111	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Jl. Hilifanikha		Hilisalawa'ahe	8000	M

5. Rasio Rumah Layak Huni

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Rasio Rumah Layak Huni	0,120	0,108	90%

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan keselamatan penghuni. Kebutuhan masyarakat Nias Selatan terhadap kepemilikan rumah layak huni masih tinggi, terutama masyarakat miskin ekstrim dan kurang mampu yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi. Untuk mendapatkan hasil rasio rumah layak huni dapat diukur melalui formulasi berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (RLH)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

dan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{41.200}{382.539} \times 100 = 0,108$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui bahwa Jumlah rumah layak huni hingga tahun 2024 adalah 41.200, sedangkan Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah 382.539 sehingga diperoleh Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2024 adalah 0,108. Capaian tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan yakni 0,120.

Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni



Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD. Namun secara keseluruhan, jumlah rumah layak huni pada tahun 2024 masih sama dengan kondisi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman karena anggaran pada tahun 2024 lebih diprioritaskan pada pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) diantaranya pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembangunan jalan atau semenisasi jalan.

Namun demikian, pembangunan rumah layak huni tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada tahun-tahun berikutnya agar masyarakat Nias Selatan dapat memiliki rumah yang layak, aman dan nyaman untuk dihuni.

6. Indeks Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	58	57,48	99,10%

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen penting dalam menyusun indeks pembangunan manusia. Indeks Pendidikan juga mencerminkan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan telah dijalankan dengan baik. Selain itu, Indeks Pendidikan menjadi barometer dalam mengukur daya saing/kompetensi sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Semakin tinggi indeks pendidikan, maka semakin kuat daya saing SDM dan semakin bagus kualitas pendidikan. Di bidang pendidikan, Kabupaten Nias telah menetapkan indikator Indeks Pendidikan sebagai salah satu acuan untuk mengukur kualitas pendidikan dan daya saing SDM.

Pada tabel diatas, capaian kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2024 untuk sementara masih menggunakan capaian tahun sebelumnya (tahun 2023), mengingat data pendukung untuk menghitung Indeks Pendidikan yaitu Indeks Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang terbaru (tahun 2024) masih belum diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS RI). Apabila

sudah ada data terbaru tersebut, maka secepatnya akan diperbaharui dalam laporan kinerja ini.

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Nias Selatan, diperoleh data Indeks Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 yaitu: 71,77 dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah yakni 43,20. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung Indeks Pendidikan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{71,00 + 43,20}{2} = 57,48$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 yaitu 57,48.

Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan



Berdasarkan grafik diatas, bila dibandingkan dengan target tahun sebelumnya maka ada peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja saat ini masih belum memenuhi target akhir RPJMD.

➤ Analisa Faktor Keberhasilan atau Kegagalan terhadap capaian kinerja

Pencapaian kinerja Indeks Pendidikan didukung oleh upaya-upaya program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai Perangkat Daerah teknis yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di



wilayah Kabupaten Nias Selatan. Adapun faktor yang berkontribusi pada kurang maksimalnya capaian kinerja Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih Kurangnya Sumber daya Manusia Tenaga Pendidik yang berkopetensi dalam meningkatnya Mutu Pendidikan.
- b. Pemetaan Guru yang belum maksimal karena masih kurang tenaga pendidikan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.
- c. Akses jaringan internet yang belum memadai di setiap sekolah.
- d. Sulitnya keadaan kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan.
- e. Belum meratanya peralatan penunjang pendidikan/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
- f. Keterbatasan anggaran daerah untuk meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu, pada tahun berikutnya dapat dilakukan upaya-upaya atau solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan antara lain :

- ❖ Melakukan pembenahan dan pembangunan sarana prasarana, infrastruktur termasuk gedung sekolah yang layak terutama di wilayah pedesaan terpencil.
- ❖ Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan guru bersertifikat (PPG) dengan harapan semakin banyak guru yang berkualitas baik maka semakin membaik kualitas pendidikan.
- ❖ Mendorong sekolah-sekolah untuk mengoptimalkan bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai peruntukannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan melakukan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dengan melibatkan Inspektorat dalam mengaudit keuangan sekolah.

Dokumentasi Capaian Kinerja di bidang Pendidikan Tahun 2024

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat PAUD



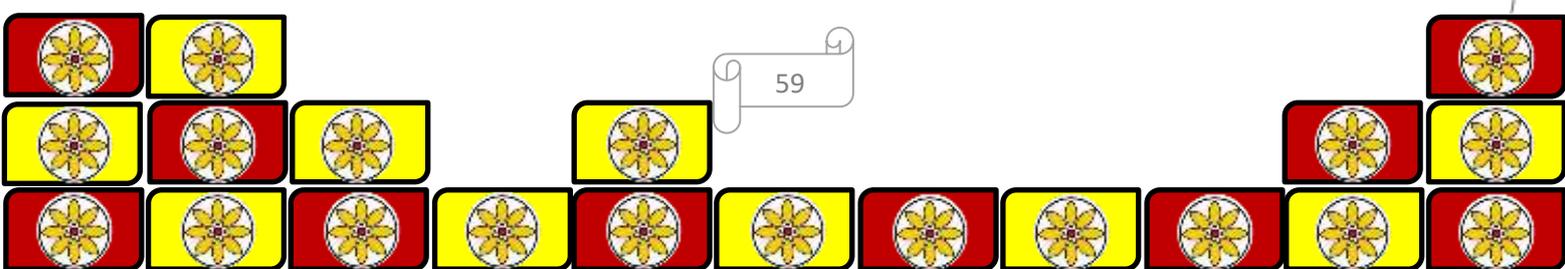
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SD



Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMP



Pembangunan Ruang Kelas TK



Pembangunan rumah dinas, ruang kelas dan rehabilitasi ruang kelas SD



Pembangunan ruang Laboratorium, ruang kelas dan rehabilitasi ruang kelas SMP



7. Indeks Kesehatan

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	67	77,96	116%

Capaian kinerja Indeks Kesehatan Kabupaten Nias selatan tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel diatas dihitung melalui rumus berikut :

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}(\text{minimal})}{\text{AHH}(\text{max}) - \text{AHH}(\text{min})} \times 100$$

Ket : AHH tahun 2024 = 71,77 Tahun

AHH (max) = 85 Tahun

AHH (min) = 25 Tahun

Berdasarkan rumus dan data diatas, maka dapat dihitung Indeks Kesehatan yaitu ;

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{71,77-25}{85-25} \times 100 = 77,95$$

Maka diiperoleh hasil sebesar 77,95.

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Angka Usia Harapan Hidup. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Dengan demikian Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Perbandingan Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan





Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan kinerja pada 2 tahun sebelumnya maka telah mengalami peningkatan signifikan. Namun masih belum mencapai target akhir RPJMD. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab pada tahun-tahun ke depannya untuk dapat mencapai target akhir RPJMD dengan maksimal.

➤ **Analisa Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Kesehatan didukung oleh berbagai hal antara lain :

- a. Peningkatan angka usia harapan hidup tahun 2024;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- c. Kerjasama dan sinergitas stakeholder yang baik dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kabupaten nias selatan;
- d. Penyelenggaraan program kesehatan oleh Dinas Kesehatan, RSUD, dan UPTD Puskesmas yang maksimal dalam melayani masyarakat Nias Selatan
- e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan BPJS Nias Selatan.
- f. Akses Layanan Kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- g. Ketersedian SDM tenaga kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.
- h. Ketersediaan fasilitas kesehatan/sarana prasarana kesehatan yang memadai yaitu 2 RSUD milik pemerintah (RSUD Lukas Hilisimaetano dan RSUD Nias Selatan) dan 1 RS Swasta (RS Stela Maris Teluk Dalam), 36 Puskesmas, 68 Puskesmas Pembantu dan 484 Posyandu yang tersebar di wilayah kabupaten Nias Selatan.

- 
- i. Menurunnya kasus kurang gizi seperti stunting dan wasting pada anak. Dimana prevalensi stunting sebesar 5 % dan wasting sebesar 3 % (E-PPGBM, 2024).
 - j. Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan kematian bayi. Pada Tahun 2024, terlapor bahwa sebanyak 6 kasus kematian ibu dari 8.891 kelahiran hidup. Bila di hitung Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup maka diperoleh AKI sebesar 67 per 100.000 Kelahiran Hidup. Capaian ini baik karena lebih rendah dari yang ditargetkan di RPJMD yaitu 205 Per 100.000 Kelahiran Hidup.
 - k. Prevalensi Penyakit Hipertensi saat ini berada pada urutan nomor 1 sebagai penyakit terbanyak pada Tahun 2024 tetapi bila dibandingkan pada tahun lalu, terjadi penurunan kasus hipertensi. Hal ini tentu baik adanya bahwa upaya-upaya penanganan dan promosi Kesehatan yang telah dilakukan dapat menekan jumlah kasus dan dapat mengubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Capaian Kinerja Indeks Kesehatan didukung juga oleh keberhasilan capaian kinerja program Dinas kesehatan Kabupaten Nias Selatan antara lain :

- a) Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)

Pada Tahun 2024, terlapor bahwa sebanyak 6 kasus kematian ibu dari 8.891 kelahiran hidup. Bila di hitung Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup maka diperoleh AKI sebesar 67 per 100.000 Kelahiran Hidup. Capaian ini baik karena lebih rendah dari yang ditargetkan di RPJMD yaitu 205 Per 100.000 Kelahiran Hidup Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan) dll. Untuk indicator penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada 9 tempat seperti pendidikan, transportasi, kesehatan yaitu sebanyak sebesar 20 % tempat yang menerapkan kawasan tanpa rokok di wilayah kabupaten Nias Selatan.

- b) Insiden HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV

Pada Tahun 2024 terlapor sebanyak 8 kasus HIV , sehingga insidensi HIV diperoleh 0,02 per 1000 Penduduk.

c) Insidensi TB per 100.000 KH

Sampai pada Tahun 2024 diperoleh bahwa terdapat sebanyak 463 Orang pasien TB yang terlapor. Bila dilihat target renja yaitu 231 per 100 rb KH, maka dapat dihitung insidensi TB dengan jumlah penduduk sebanyak 389.957 jiwa yaitu:

$$(463/389.957) \times 100.000 = 118$$

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa insidensi TB yaitu 118 per 100 rb KH, dan hal ini menunjukkan pencapaian sudah bagus. Karena insiden yang terjadi lebih kecil dari target yang diharapkan.

d) Jumlah Puskesmas melaksanakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Sebanyak 36 Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Nias Selatan menyediakan layanan UBM.

e) Pelayanan kesehatan Balita

Untuk indicator pelayanan kesehatan balita didapatkan realisasi kegiatan sebesar 88%. Artinya sebanyak 31984 balita mendapat pelayanan kesehatan balita yang meliputi pemantauan tumbuh kembang, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan serta tatalaksana balita sakit jika diperlukan.

f) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar yaitu 80%

g) Pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 84%

h) Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 70%

i) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang



melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %

- j) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%
- k) Pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 77%
- l) Pelayanan Kesehatan pada Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %
- m) Pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 46 %
- n) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 31,1%
- o) Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 11.70%
- p) Sampai pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa bila dibandingkan tahun 2023 dimana terdapat laporan 4 kasus kematian ibu, maka capaian pada 2024 terdapat peningkatan kasus kematian pada ibu menjadi 6 kasus. Hal ini menunjukkan capaian yang kurang baik dimana penurunan kasus kematian ibu menjadi 12 per 100 ribu KH dari target 2024 yaitu 15 per 100 ribu KH.
- q) Persentase Fasilitas Pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan sebanyak 27,02 %
- r) Persentase imunisasi dasar pada anak usia 12-23 bulan sebanyak 25 %
- s) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 100 %
- t) Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar yaitu sebanyak 11 %
- u) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita yaitu 5 %
- v) Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita 2 %
- w) Temuan kasus TR baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) 30

Per 100 KH

x) Treatment coverage pada pasien TB yaitu sebanyak 100%

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal seperti terlihat pada dokumentasi gambar di bawah ini :

Dokumentasi Program Kesehatan Di Kabupaten Nias Selatan

Pelaksanaan Imunisasi Anak



Pelaksanaan Posyandu : Pengukuran TB, BB dan pemeriksaan Kesehatan bayi dan pemberian imunisasi



Pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir



Penjaringan di Sekolah



Melakukan perujukan pasien ke FKTL



Pelayanan Kesehatan pada Lansia



Pelayanan Kesehatan Gigi



Kegiatan Penanganan KLB Malaria dan DBD



Pelayanan Kesehatan di RSUD Nias Selatan



Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan tahun 2024:

No	Jenis Tenaga Medis / Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Umum	54
2	Dokter Gigi	9
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1
4	Dokter Spesialis Anak	1
5	Dokter Spesialis Bedah	1
6	Dokter Spesialis Paru	1
7	Dokter Spesialis Kandungan	1
8	Perawat	874
9	Bidan	1074
10	Farmasi	71
11	Ahli Gizi Nutrition	43
12	Teknisi Medis	45
13	Sanitarian	44
14	Tenaga Kesehatan Masyarakat	127

Kabupaten Nias Selatan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Nias Selatan meliputi status gizi ibu hamil, pelayanan imunisasi, pelayanan KIA dan KB, pelayanan antenatal serta perbaikan kondisi lingkungan dan ekonomi telah berjalan dengan baik. Upaya untuk penempatan tenaga kesehatan di wilayah kerja Nias Selatan, Cakupan puskesmas disetiap wilayah kabupaten Nias Selatan juga telah memenuhi target sehingga hal ini sangat mempengaruhi ketercapaian sasaran karena membantu akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar maupun tingkat lanjut.

8. Indeks Pengeluaran

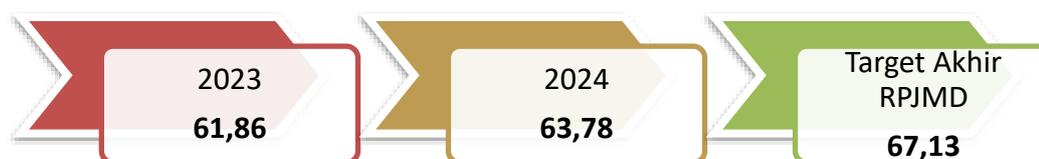
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62	63,78	102,87%

Definisi terhadap indeks pengeluaran atau disebut dengan pengeluaran per kapita penduduk adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota keluarga terhadap kebutuhan barang dan jasa yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran penduduk dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap pengeluaran total maka semakin mebaik tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, indeks pengeluaran menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja

Pemerintah Daerah Nias Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024 telah ditetapkan target Indeks Pengeluaran sebesar 62 dan terealisasi sebesar 63,78. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat nias selatan meningkat pada tahun 2024 dibandingkan dengan Indeks Pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian pada tahun 2024 masih belum memenuhi target akhir RPJMD. Perbandingan Indeks Pengeluaran dapat dilihat sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Indeks Pengeluaran



➤ Analisa Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan meningkatnya Indeks Pengeluaran tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama dalam 17 jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Nias Selatan.
2. Adanya upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menjaga iklim pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi melalui kegiatan monitoring berkala di pasar-pasar atau kegiatan usaha masyarakat.

3. Pemberian bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang positif.

Meskipun ada trend kenaikan Indeks Pengeluaran pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tetap mengupayakan agar pengeluaran per kapita atau indeks pengeluaran Nias Selatan terus meningkat agar mencapai target akhir RPJMD 2021-2026 sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Selatan. Beberapa upaya yang mesti dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian terhadap indeks pengeluaran ini sebagai berikut:

- ❖ Menekan laju inflasi dengan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap harga-harga barang di pasar tradisional.
- ❖ Memberikan stimulan peningkatan daya beli ekonomi masyarakat melalui pencairan dana-dana bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat baik dana yang bersumber dari APBD melalui dana desa maupun dana yang berasal dari APBD Provinsi dan APBN yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

9. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,7	3,82	103,24%

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dalam menganalisa perekonomian masyarakat apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi secara riil diukur dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan perekonomian suatu wilayah atau kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, PDRB diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Kedua pendekatan ini dapat menyajikan komposisi data nilai tambah suatu wilayah dengan merinci sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan komponen penggunaannya. Sedangkan pada pendekatan pengeluaran menyajikan tentang penggunaan dari nilai tambah ekonomi tersebut.

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu indikator kinerja Bupati Nias Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dan telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati tahun 2024 yaitu 3,7. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Nias Selatan pada rilis Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka Tahun 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan yaitu 3,82. Dalam hal ini, capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi telah mencapai lebih dari 3,7 (target PK 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat sebagai berikut :

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan





Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja LPE tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Namun, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian tahun 2024 masih belum memenuhi target akhir RPJMD 2021-2026. Pencapaian terhadap realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi ini tidak terlepas dari kegiatan perekonomian masyarakat Nias Selatan yang sedikit mengalami pertumbuhan walaupun tidak terlalu signifikan. Kegiatan perekonomian masyarakat Nias Selatan meliputi 17 lapangan usaha antara lain :

- 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Pengadaan listrik dan gas;
- 5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- 6) Konstruksi;
- 7) Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
- 8) Transportasi dan pergudangan;
- 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum;
- 10) Informasi dan komunikasi;
- 11) Jasa keuangan dan asuransi;
- 12) Real estat;
- 13) Jasa perusahaan;
- 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
- 15) Jasa pendidikan;
- 16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Jasa lainnya.

10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	2,8	2,98	106,42%

Laju pertumbuhan ekonomi pertanian atau dengan sebutan lain Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah turut berkontribusi terhadap pengembangan potensi pertanian dan kemajuan pembangunan di sektor pertanian suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertanian sebagai salah satu indikator penting dalam RPJMD 2021-2026 dan ditetapkan juga sebagai salah satu indikator kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja Bupati Tahun 2024. Alasan penting bahwa LPE Pertanian menjadi indikator kinerja Bupati adalah bahwa sektor pertanian berperan penting dan menjadi kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data BPS dalam laporannya “Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2024” bahwa PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2024 sebesar 4.067,13 miliar rupiah, sektor pertanian menjadi penyumbang/kontributor terbesar dengan peranan

mencapai 44,55%. Hal ini sejalan dengan lapangan usaha masyarakat yang mayoritas bersumber dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian maka dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$$

Ket:

PDRB atas dasar harga konstan

t= tahun berjalan

t-1= tahun sebelumnya

IP= Kategori Pertanian

Berdasarkan rumus diatas, maka PDRB Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2024 sebesar 2.227,28 milyar rupiah dan PDRB pada tahun sebelumnya 2023 sebesar 2.162,85 milyar rupiah. Dengan menggunakan kedua data tersebut maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian sebagai berikut :

$$\frac{2.227,28 - 2.162,85}{2.162,85} \times 100\% = 2,98$$

Dari perhitungan diatas maka diperoleh PDRB sektor Pertanian atau LPE Pertanian pada tahun 2024 yaitu 2,98. Capaian Kinerja tahun 2024 diatas telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu 2,8. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, LPE Pertanian tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding LPE tahun 2023. Namun bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, LPE Pertanian 2024 masih belum memenuhi target akhir RPJMD. Berikut dapat dilihat perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian



➤ Analisa Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

Keberhasilan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian pada tahun 2024 didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian antara lain :

- a. Pembangunan jalan usaha tani yang bertujuan untuk memudahkan mobilitas aktivitas masyarakat tani dan mempercepat akses menuju areal pertanian, menekan biaya pangangkutan, menghemat biaya dan mengurangi penyusutan hasil produksi saat pengangkutan menuju rumah petani;
- b. Peran penyuluh pertanian yang selalu memberikan bimbingan teknis budidaya kepada petani sehingga produksi dapat meningkat, adanya pembangunan prasarana dan sarana pertanian serta pemberian alat dan mesin pertanian kepada Kelompok Tani;
- c. Penyediaan beberapa alat mesin pertanian dalam mendukung efektivitas pengolahan lahan pertanian
- d. Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima manfaat.
- e. Profesionalitas ASN di Dinas Pertanian dan pihak-pihak lain yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pertanian yang

berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian di sektor pertanian.

Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Sektor Pertanian Tahun 2024

Pembangunan Jalan Usaha Tani

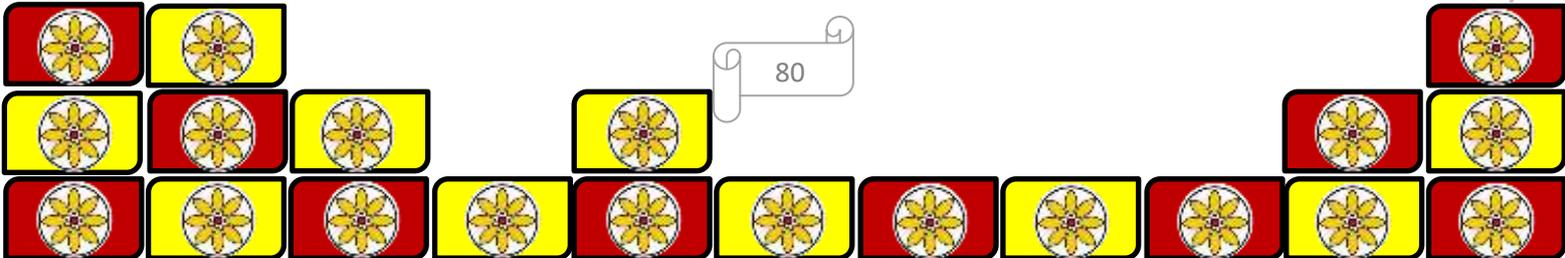


Pengadaan Alat Mesin Pertanian





Pengadaan Sarana Produksi Jagung dan Cabai





Pengadaan Bibit Ternak Babi

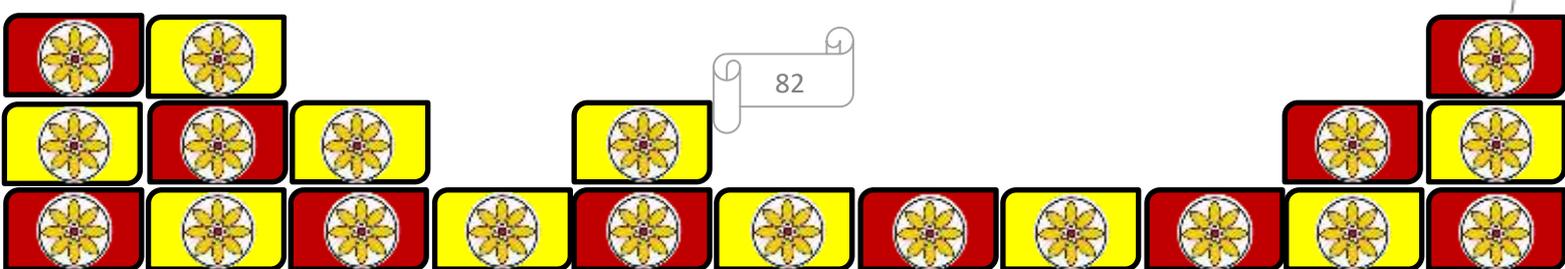




11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	5,7	4,62	81,05%

Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata. Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan peranan penting terhadap penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa destinasi wisata yang cukup terkenal di Nias Selatan adalah wisata pantai, wisata bahari, dan wisata budaya. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata terdiri dari akomodasi dan makan minum di sektor pariwisata. Oleh karena itu, Laju pertumbuhan ekonomi pariwisata atau PDRB sektor pariwisata menjadi salah satu indikator kinerja



Bupati dalam RPJMD 2021-2026 dan telah ditetapkan juga sebagai salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2024. PDRB pariwisata dapat dihitung dengan formulasi berikut :

$$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100$$

Ket:

PDRB atas dasar harga konstan

T = tahun berjalan

t-1= tahun sebelumnya

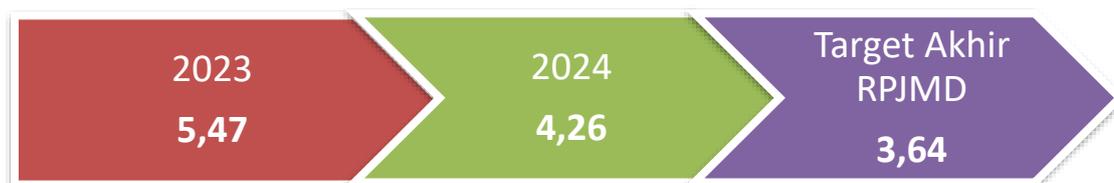
IP = Kategori Pariwisata

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata sebagai berikut :

$$\frac{102,07 - 97,56}{97,56} \times 100 = 4,62$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yaitu 4,62. Realisasi tersebut telah belum memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5,7.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan telah melebihi target akhir RPJMD. Meskipun demikian, program dan kegiatan sektor pariwisata telah dilaksanakan pada tahun 2024 terutama di bidang pengembangan



potensi perekonomian sektor pariwisata. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Nias Selatan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan dan promosi kepariwisataan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar daerah. Pada tahun 2024, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga kembali menyelenggarakan Kejuaraan Surfing Internasional Nias Pro 2024 WSL QS 5000. Event ini telah memberikan dampak yang cukup besar bagi Kabupaten Nias Selatan. Jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan di Kabupaten Nias Selatan yaitu 5.606. apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun 2023 sebanyak 4.526 maka jumlah wisatawan yang mengunjungi Nias Selatan pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

➤ **Analisa Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Penyelenggaraan event-event pariwisata di Nias Selatan sepanjang tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, hunian hotel dan wisata kuliner tradisional. Event wisata yang dilaksanakan antara lain Nias Pro 2024.
- b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan didukung oleh Program Pemasaran Pariwisata pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Dokumentasi Kegiatan Pariwisata Tahun 2024

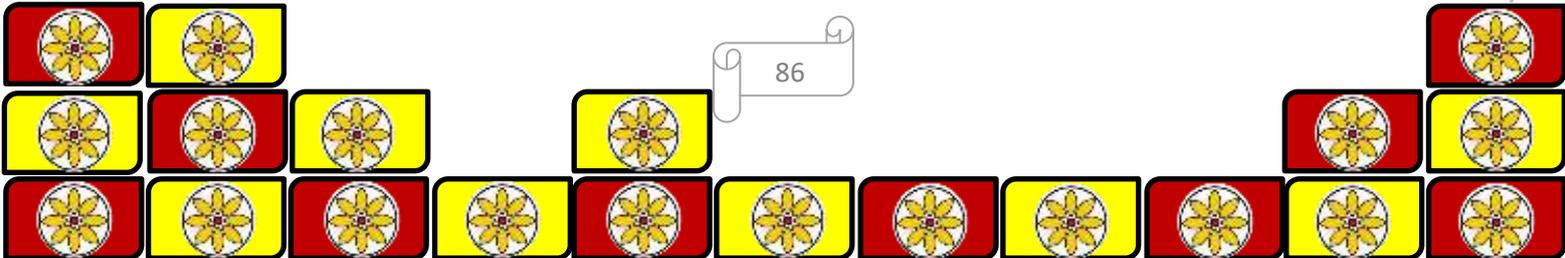


Malam Pesona Budaya Nias Selatan





Turnament E-Sport Mobile Legend 2024



Maniamolo Fest 2024



12. Indeks Resiko Bencana

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Indeks Resiko Bencana (IRB)	189	202	93,56%

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Untuk mengukur tingkat resiko bencana mengalikan fungsi



bahaya (*hazard*) dengan kerentanan (*vulnerability*) atau dengan rumus $R = H \times V$.

Indeks Resiko Bencana dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana pada suatu wilayah. Kondisi alam/topografi Kabupaten Nias Selatan pada umumnya terdiri dari bukit-bukit yang sempit dan terjal serta pegunungan dengan tinggi 0-800 meter diatas permukaan laut, dataran rendah sampai bergelombang sekitar 20%, tanah bergelombang sampai berbukit-bukit sebesar 28,8% dan berbukit sampai pegunungan sebesar 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Selain itu, Kabupaten Nias Selatan terdiri dari beberapa pulau-pulau dan didominasi oleh laut yang cukup luas.

Potensi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam di wilayah Kabupaten Nias Selatan tergolong tinggi. Adapun jenis bencana yang sering terjadi di Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Kebakaran Rumah
- Gempa Bumi
- Longsor
- Banjir bandang
- Angin puting beliung
- Gelombang tinggi
- Kebakaran hutan dan lahan
- Gelembung gas
- Tenggelam/hanyut

Oleh karena itu, Indeks Resiko Bencana menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2021-2026 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan

penanggulangan bencana. Dengan menurunnya indeks resiko bencana, maka potensi terjadinya bencana di suatu daerah lebih kecil peluangnya, sedangkan apabila indeks resiko bencana tinggi maka peluang terjadinya bencana juga lebih besar terjadi di wilayah tersebut. Untuk menekan indeks resiko bencana, maka Pemerintah Daerah memfokuskan pada upaya-upaya menurunkan resiko bencana di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Data Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024



Berdasarkan data <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> diatas, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 yaitu **202**. Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditentukan yakni 189. Hal ini menunjukkan bahwa resiko bencana di kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 masih tergolong **tinggi**. Apabila dibandingkan dengan Indeks bencana tahun 2023 yaitu 190,25 maka indeks bencana tahun 2024 mengalami kenaikan. Adapun bencana yang terjadi pada tahun 2024 di wilayah kabupaten Nias Selatan antara lain kejadian tenggelam/orang hilang di Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Mazino, Kecamatan Somambawa

dan kejadian luar biasa (KLB) Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kepulauan Batu khususnya di Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Simuk.

Untuk mengurangi resiko bencana di wilayah Nias Selatan, Pemerintah Kabupate Nias Selatan mengupayakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana yang siap siaga, terampil, dan profesional.
- Melakukan kajian resiko bencana (risk assesment) secara berkala dan menyusun peta resiko bencana.
- Melakukan pengelolaan resiko bencana melalui upaya pencegahan, mitigasi, pengalihan resiko bencana, dan penerimaan resiko bencana.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang penanggulangan bencana daerah melalui peraturan daerah.
- Menyediakan logistik untuk kondisi darurat bencana.
- Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara stakeholder dalam menanggulangi bencana.

13. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan tertib patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah berlaku, maka ditetapkan indikator

kinerja Bupati “persentase perda dan perkada yang ditegakkan” dengan target sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, terdapat 3 Peraturan yang rutin ditegakkan oleh Satpol PP sehingga realisasi terhadap kinerja ini adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada Yang Memuat Sanksi}} \times 100\%$$

Maka perhitungannya adalah :

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Adapun Peraturan yang ditegakkan atau disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat antara lain :

1. Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" Di Kabupaten Nias Selatan
2. Perbub Nias Selatan Nomor 04.20_33 Tahun 2017 Tentang Larangan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Nias Selatan
3. Perbub Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Ketiga Peraturan diatas berkontribusi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat Nias Selatan. Untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah dan perkada agar terwujud tertib patuh terhadap peraturan di Kabupaten Nias Selatan adalah :

- Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang memuat sanksi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tersebut dan memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan.
- Meningkatkan kapasitas petugas penegakan perda dan perkada untuk melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

- Menyediakan fasilitas atau sarana prasarana yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan yang telah berlaku, baik secara offline (pamflet, papan pengumuman, dll) maupun online melalui platform media sosial.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan tahun 2024 didukung oleh ketersediaan anggaran melalui APBD Tahun 2024. Adapun anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2024 yaitu **1.730.280.463.148** dengan realisasi belanja yaitu **1.592.441.517.658** dan surplus anggaran sebesar **137.838.945.490**. berdasarkan realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2024 maka dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran belanja sebesar **92,03%**. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program-program dan kegiatan guna tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.560.183.438.647,37	1.552.128.805.972,14	99,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.062.368.430,37	30.783.762.868,34	139,53
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.849,37	14.023.775.776,15	147,82
4.1.02	Retribusi Daerah	385.605.800,00	284.552.800,00	73,79

4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.066.435.843,00	6.066.435.843,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.123.371.938,00	10.408.998.449,19	169,99
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.062.368.430,37	30.783.762.868,34	139,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.521.621.070.217,00	1.507.603.342.818,80	99,08
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.478.571.070.217,00	1.472.502.516.093,80	99,59
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.050.000.000,00	35.100.826.725,00	81,54
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.500.000.000,00	13.741.700.285,00	83,28
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000.000,00	13.741.700.285,00	83,28
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.500.000.000,00	13.741.700.285,00	83,28
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.183.438.647,37	1.552.128.805.972,14	99,48
5	BELANJA DAERAH	1.730.280.463.148,00	1.592.441.517.658,05	92,03
5.1	BELANJA OPERASI	909.171.300.857,39	825.523.799.703,80	90,80
5.1.01	Belanja Pegawai	509.468.114.147,99	455.727.333.392,00	89,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.739.527.764,40	283.895.556.571,80	94,09
5.1.04	Belanja Subsidi	3.134.177.130,00	829.895.000,00	26,48
5.1.05	Belanja Hibah	89.126.239.815,00	80.531.001.740,00	90,36
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.703.242.000,00	4.540.013.000,00	79,60
	JUMLAH BELANJA OPERASI	909.171.300.857,39	825.523.799.703,80	90,80
5.2	BELANJA MODAL	331.478.943.321,00	292.305.992.715,25	88,18
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.438.383.812,00	23.014.782.514,33	90,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.065.694.848,00	153.659.718.980,92	92,53

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.214.756.511,00	114.104.855.370,00	82,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.314.688.650,00	1.083.760.150,00	82,43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	445.419.500,00	442.875.700,00	99,43
	JUMLAH BELANJA MODAL	331.478.943.321,00	292.305.992.715,25	88,18
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.171.573.604,61	1.954.521.800,00	14,84
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.171.573.604,61	1.954.521.800,00	14,84
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	13.171.573.604,61	1.954.521.800,00	14,84
5.4	BELANJA TRANSFER	476.458.645.365,00	472.657.203.439,00	99,20
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	987.256.065,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	475.471.389.300,00	472.657.203.439,00	99,41
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	476.458.645.365,00	472.657.203.439,00	99,20
	JUMLAH BELANJA	1.730.280.463.148,00	1.592.441.517.658,05	92,03
	SURPLUS/DEFISIT	(170.097.024.500,63)	(40.312.711.685,91)	23,70
6	PEMBIAYAAN DAERAH	170.097.024.500,63	170.097.024.500,63	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175.097.024.500,63	175.097.024.500,63	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.097.024.500,63	175.097.024.500,63	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175.097.024.500,63	175.097.024.500,63	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00

	PEMBIAYAAN NETTO	170.097.024.500,63	170.097.024.500,63	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	129.784.312.814,72	0,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 telah menyajikan berbagai keberhasilan dan juga hambatan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun ketiga pada RPJMD periode 2021 – 2026. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Nias Selatan Tahun 2024 terdiri dari **7 Sasaran Strategis** dan **13 Indikator Kinerja** serta **81 Program** yang disertai dengan anggaran belanja pada masing-masing program. Semua indikator kinerja telah diukur dengan menggunakan rumus/formulasi masing-masing sehingga diperoleh realisasi yang terukur dan valid. Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat dinyatakan “**berhasil**” target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **98,65%**. Meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, namun tidak bisa dipungkiri bahwa capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian sasaran kinerja dan indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan lebih rinci dalam bab 3 telah didukung oleh upaya-upaya semua pihak terutama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat berdampak baik dan bermanfaat bagi masyarakat Nias Selatan. Adapun kendala, hambatan dan tantangan yang menyebabkan masih terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya maka dijadikan



sebagai bahan dan fokus perbaikan di tahun berikutnya. Berbagai upaya tetap dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, termasuk upaya sinergitas, koordinasi yang aktif dan solutif dengan berbagai instansi kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan daerah terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai evaluator kinerja instansi pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun demi mewujudkan visi “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : **BUPATI NIAS SELATAN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Teluk Dalam, 10 Oktober 2024


BUPATI NIAS SELATAN,
DR. HILARIUS DUHA, SH., MH

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

Sasaran Strategis		Indikator	Target
Misi 1 : Menciptakan Kultur Serta Karakter Yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92
		Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP
		Nilai SAKIP	56
Misi 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skala Prioritas			
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	40%
		Rasio Rumah Layak Huni	0,120
Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing Serta Kreatif dan Inovatif			
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	58
4	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	67
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pengeluaran	62
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Produktif dan Tidak Konsumtif			
6	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,7
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	2,8
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata	5,7
Misi 5 : Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat			
7	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Indeks Resiko Bencana (IRB)	189
		Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	100%

**APBD PERUBAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	572.776.847.199
2	Program Pengelolaan Pendidikan	216.867.404.900
3	Program Pengembangan Kurikulum	7.499.895
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.619.985
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.282.223.992
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.469.582.550
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	256.601.000
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.254.757.515
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.027.108.143
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.823.661.000
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.772.000.000
12	Program Penataan Bangunan Gedung	21.155.424.762
13	Program Penyelenggaraan Jalan	102.930.371.987
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.202.868.800
15	Program Pengembangan Perumahan	10.276.170
16	Program Kawasan Permukiman	10.420.570
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.937.020.873
18	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	669.150.587
19	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	68.500.000
20	Program Penanggulangan Bencana	51.850.000
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	719.799.375
22	Program Penanganan Bencana	702.000.039
23	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	610.098.624
24	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	243.125.000
25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	555.783.000
26	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	250.000.000
27	Program Pengendalian Penduduk	895.023.400

28	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.742.647.750
29	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.195.620.000
30	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	153.526.994
31	Program Penanganan Kerawanan Pangan	332.197.982
32	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	9.100.000
33	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.027.554.427
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	30.000.000
35	Program Administrasi Pemerintahan Desa	106.980.243
36	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.006.355.732
37	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	479.771.065
38	Program Pengelolaan Pelayaran	4.831.609.000
39	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	449.066.225
40	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	973.112.285
41	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	40.000.000
42	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	30.000.000
43	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.121.300
44	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	330.875.000
45	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.450.000.000
46	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	30.291.400
47	Program Pengembangan Kebudayaan	440.840.270
48	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	329.352.600
49	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	398.932.550
50	Program Pemasaran Pariwisata	5.804.775.140
51	Program Pembinaan Perpustakaan	250.000.000
52	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	345.125.118
53	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	149.112.958
54	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.699.000

55	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.543.820.498
56	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.768.915.765
57	Program Penyuluhan Pertanian	784.943.710
58	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	535.117.155
59	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	30.056.500
60	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.592.242.853
61	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.130.847.005
62	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.218.866.450
63	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	397.166.155
64	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	493.179.295
65	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	436.606.630
66	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	493.753.532.360
67	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.310.161.213
68	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.963.750
69	Program Kepegawaian Daerah	935.935.800
70	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.424.677.415
71	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	595.219.550
72	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	429.755.314
73	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1.123.713.451
74	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.679.731.862
75	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	207.559.572
76	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.003.100
77	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.737.234.235
78	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	75.605.719.705
79	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.297.500

80	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	542.922.100
81	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	401.587.800
	TOTAL ANGGARAN	1.730.280.463.148